

Dampak Pariwisata terhadap Kemiskinan di Kawasan Pariwisata di Bali

I Nyoman Sudiarta dan I Wayan Suardana

Universitas Udayana

Email: sudiarta.nyoman@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the typology of poverty, its causes and its impact on the poor in the tourism area of Tulamben Tourism and Candidasa in Karangasem regency. Research using purposive sampling method with a sample size 94 coastal residents. Data analyzed by using descriptive statistics. The research results are as follows: (i) Typology of poverty of coastal communities, among others: the age of majority is 60 years old and above, low education (graduated primary school), the average income of 300,000/ month, (ii) Causes of poverty included natural factors, cultural factors, and the lack of poor people to work in the tourism sector, and (iii) the impact of tourism on coastal communities positively impact the chances of opening new jobs like being a tour guide of diving, porter, and souvenir sellers.

Keywords: impact of tourism, tourist attraction, Bali, tourism management, poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi kemiskinan, penyebab kemiskinan dan dampak pariwisata terhadap masyarakat miskin di Kawasan Pariwisata Tulamben dan Candidasa, Kabupaten Karangasem. Penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 94 penduduk pesisir. Analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut (i) Tipologi kemiskinan masyarakat pesisir, antara lain: umur sebagian besar 60 tahun ke atas, pendidikan yang rendah (tamat SD), pendapatan rata-rata sebesar 300.000/bulan, (ii) Penyebab kemiskinan di antaranya adalah faktor alam, faktor budaya, dan kurangnya masyarakat miskin untuk bekerja pada sektor pariwisata, dan (iii) Dampak pariwisata bagi masyarakat pesisir adalah positif bagi peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru seperti menjadi pengantar tamu *diving*, porter, dan penjual cenderamata.

Kata kunci: Dampak pariwisata, daya tarik wisata, Bali, manajemen pariwisata, kemiskinan

Pendahuluan

Masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia sejak lama, dan kian efektif dalam dua dekade terakhir. Salah satunya adalah konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang digagas sejak tahun 2000 di mana berkumpul ratusan pemimpin dunia yang tidak lain tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang menjadi momok hampir setiap negara di dunia. Konsep MDGs berakhir pada tahun 2015 dan digantikan dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang akan berakhir pada tahun 2030 (<http://www.sdgfund.org/mdgs-sdgs>). Lahirnya konsep SDGs menyiratkan betapa pentingnya program mengurangi kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia.

Upaya implementasi MDGs dilakukan dengan berbagai strategi oleh pemerintah pusat sampai dengan daerah. Di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan yang memetakan dan menyampaikan strategi dalam mengurangi kemiskinan (Tim TKPKD, Provinsi Bali tahun 2010). Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Saptanti, 2013). Konsep lainnya yang telah mendunia adalah *Pro Poor Tourism* (Ashley, 2000; 2006; African Pro Poor Tourism Development Centre). Berbagai strategi yang dilakukan menggambarkan betapa pentingnya mengurangi kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pro Poor Tourism (PPT) adalah sebuah konsep yang dikembangkan di berbagai belahan dunia. Konsep ini dideklarasikan untuk mengantisipasi dampak pariwisata pada berbagai kehidupan masyarakat. Pariwisata dengan perencanaan yang komprehensif diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pariwisata, namun sebaliknya dapat berperan penting untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Berbagai dampak negatif adanya pembangunan pariwisata yang tidak direncanakan menjadi salah satu alasan munculnya konsep pariwisata yang peduli dengan masyarakat miskin, yang dikenal dengan istilah *Pro Poor Tourism* (Ashley, 2006; Darma Putra dan Pitana, 2010).

Ashley (2006) menyatakan pariwisata memiliki beberapa keuntungan bagi perekonomian yang pro pada masyarakat miskin, karena: (1) konsumen datang ke tempat tujuan, sehingga

memberikan kesempatan untuk menjual barang dan jasa, seperti cendera mata, (2) pariwisata memberikan kesempatan untuk melakukan diversifikasi perekonomian masyarakat lokal, (3) pariwisata menawarkan kesempatan kerja yang lebih intensif. Hal ini didukung hasil penelitian World Tourism Organization (2015) yang menyatakan pariwisata sebagai suatu industri berperan dalam menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Lebih lanjut Ashley (2006) menyatakan PPT adalah dampak positif pariwisata bagi masyarakat miskin. PPT bukan suatu produk tetapi merupakan suatu pendekatan ke arah industri, di mana pariwisata diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada berbagai sektor pariwisata. PPT bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan manfaat sosial pariwisata, dan mengurangi dampak negatif pariwisata.

Manajemen pariwisata yang peduli pada kemiskinan sejalan dengan amanat Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Berbagai penelitian terkait pariwisata dan kemiskinan diberbagai belahan dunia menggambarkan betapa pentingnya pariwisata bagi praktisi pariwisata, pemerintah dan juga akademisi. Penelitian yang mengambil tema pariwisata dan kemiskinan sudah banyak dilakukan namun masih terbatas yang melakukan penelitian pada destinasi pariwisata Bali.

Pariwisata versus Kemiskinan

Ada sejumlah kajian tentang peran pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan termasuk di berbagai negara atau daerah Suardana (2004); Ashley (2006); Darma Putra dan Pitana (2010); Sudiarta (2011); Madiun (2010), dan I Made Patera (2016). Madiun (2010) menyatakan pariwisata telah mengakibatkan masyarakat lokal termarginalisasi dalam merebut peluang usaha dan dikalahkan oleh pengusaha besar. Dengan berbagai keterbatasan masyarakat, seperti komunikasi, modal, jaringan, kompetensi, serta tidak mampu untuk bersaing dengan kuatnya tekanan pasar pariwisata. Hal tersebut telah mengakibatkan kegagalan masyarakat lokal dalam berpartisipasi dalam pariwisata sebagai wujud pariwisata berbasis masyarakat lokal.

Beberapa hasil penelitian menggambarkan adanya hasil yang tidak konsisten tentang peran pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa peneliti menyatakan pariwisata memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan (Suardana, 2004; Darma Putra dan Pitana, 2010; Sudiarta, 2011). Namun, peneliti lain menyatakan tidak yakin akan peran pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan (Damanik dan Kusworo, 2005: 107). Atas dasar adanya hasil penelitian yang tidak konsisten, maka penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fenomena tersebut dan menghasilkan hasil penelitian yang konsisten. Penelitian ini berkonsentrasi pada konsep yang dikembangkan oleh Ashley (2006) dan indikator yang digunakan relevan dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Bali.

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk mengembangkan model penelitian pariwisata dan kemiskinan berbasis empiris. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan pelaku pariwisata dengan memanfaatkan industri pariwisata sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan.

Pendekatan *Pro Poor Tourism*

Walaupun penelitian tentang pariwisata dan kemiskinan sudah banyak dilakukan namun beberapa peneliti menyatakan bahwa data mengenai besaran peran pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan sampai saat ini masih terbatas. Dalam implementasi belum banyak *best practice* bahwa pariwisata secara faktual mampu menanggulangi kemiskinan (Damanik dan Kusworo, 2005: 107). Perdebatan tentang pariwisata sebagai kegiatan yang *pro-poor* atau tidak, jawabannya tergantung kepada situasi, dan harus dikaji kasus demi kasus. Pandangan ini mulai mencuat ketika muncul konsep *pro poor tourism*, dengan pengertian bukan membuat produk baru pariwisata dan bukan pula untuk menjual kemiskinan sebagaimana *tour* mengunjungi kantong-kantong kemiskinan seperti terjadi pada kasus *tour* di Jakarta (Subagja, 2010: 1).

Ashley dan Roe (2002) melakukan analisis implementasi terhadap masyarakat miskin. Berdasarkan pada fakta bahwa di Afrika Selatan banyak masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan walaupun beberapa wilayah berkembang sentra-sentra kepariwisataan. Dengan mengambil kasus pada enam

daerah pariwisata pada tipologi yang berbeda di Afrika Selatan ditemukan bahwa strategi *pro poor* sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini perlu disesuaikan dengan keadaan setempat, target pasar dan kepentingan masyarakat (Ashley dan Roe, 2002).

Memaksimalkan dampak pariwisata terhadap masyarakat tidak harus dalam skala besar. Penelitian dilakukan oleh Trevor dan Troter (2006: 163-174) menemukan pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan dengan skala kecil di provinsi Kwazulu-Natal, Afrika Selatan mampu mengatasi krisis ekonomi. Penelitian lainnya dari Mograbi dan Rogeron (2007: 85-102) dengan kasus pariwisata bahari di Teluk Sodwana Afrika Selatan. Adanya mekanisme kontrol, pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala kelompok operator secara berkeadilan, dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat secara signifikan. Dampak nyata dari upaya pengentasan kemiskinan adalah peningkatan tenaga kerja khususnya *diver operator* (sebanyak 637 tenaga kerja berasal dari masyarakat, sebanyak 52% berasal dari masyarakat lokal, 47% dari luar wilayah, dan 28% dari luar daerah. Usaha yang dominan berkembang adalah kerajinan, penginapan, serta fasilitas untuk penyelaman, dan produksi kayu bakar.

Kategori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu sentral di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, terutama pascakrisis tahun 1997-1999. Levitan 1980 (dalam Nawawi, 2009:119) mendefinisikan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan layanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sejalan dengan itu, Lewis (dalam Usman, 2009:3) mengategorikan kemiskinan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kultural, pendekatan situasional, dan pendekatan interaksional. Pendekatan kultural bahwa kemiskinan merupakan suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama. Berbeda dengan yang diasumsikan Lewis (dalam Usman, 2009: 3) menyatakan bahwa ciri-ciri subkultur orang miskin bukan karena kebudayaan yang dihasilkan secara turun temurun, tetapi karena situasi yang menekan yang disebut pendekatan situasional.

Sedangkan pendekatan interaksional oleh Gans (dalam Usman, 2009: 4) perilaku dan ciri-ciri yang ditampilkan kaum

miskin merupakan hasil interaksi di antara faktor kebudayaan yang sudah tertanam dalam diri orang miskin karena ada faktor yang menekan. Dengan menggunakan ukuran pendapatan di bawah standar kemiskinan ekstrim PBB, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 tercatat sebanyak 34,96 juta atau 15,42% jumlah penduduk turun sebesar 5,94% dari tahun sebelumnya (Hermantoro, 2010: 20). Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) memprediksi bahwa tahun 2011 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,50% atau 25 juta orang dari jumlah penduduk yang diperkirakan 231,7 juta orang. Penduduk miskin di Indonesia menurut BPS – statistik Indonesia mencapai 17,37 juta pada tahun 2014 dan mencapai 17,94 juta pada tahun 2015 (<http://bps.go.id/brs/view/1158/>, diunduh Tanggal 8 Januari 2016: 21.00 wita).



Foto 1. Beberapa akomodasi di Pantai Tulamben, membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat (Foto Gian Saputra).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan pariwisata Tulamben (Foto 1) dan Candidasa (Foto 2), Kabupaten Karangasem, Bali. Wilayah desa administratif yang menjadi lokasi penelitian meliputi empat desa yang berada di dua wilayah kecamatan. Adapun wilayah desa pesisir yang termasuk dalam penelitian ini adalah Desa Tulamben,

dan Desa Purwakerthi. Sedangkan di Kawasan Candidasa terdiri dari Desa Nyuh Tebel, dan Desa Padangbai. Pemilihan Desa ini merupakan desa yang mengembangkan pariwisata bahari dengan berbagai industri pendukungnya.

Keempat desa ini memiliki karakteristik daya tarik wisata yang sama dan masyarakat pada desa ini sebagian besar memiliki dua mata pencaharian selain mata pencaharian utama nelayan atau petani dan sebagai buruh. Pemilihan Kabupaten Karangasem sebagai lokasi penelitian, mengingat tingkat kemiskinan di kabupaten adalah tertinggi di Bali dan letaknya di desa kawasan timur Kabupaten Karangasem.



Foto 2. Nelayan di Candidasa, mencari ikan dan juga mengangkut wisatawan (Foto Darma Putra)

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Karangasem memiliki pertumbuhan penduduk mencapai 0,96 persen pada tahun 2014, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Rendang sebesar 0,84 persen dan terendah di Kawasan Tulamben sebesar 0,48 persen. Kabupaten Karangasem yang terdiri atas delapan kecamatan memiliki persebaran penduduk yang tidak merata, sebagian besar penduduk bermukim di bagian utara terutama Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang sedangkan di bagian selatan penduduk terkonsentrasi di Kawasan Tulamben dan Manggis. Kawasan Tulamben merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk

terbesar mencapai 98.882 orang.

Kabupaten Karangasem memiliki proporsi rumah tangga miskin terbesar di Provinsi Bali, yang mencapai 33,66 persen. Hal ini memiliki arti bahwa setiap tiga rumah tangga terdapat satu rumah tangga miskin. Berdasarkan pada indeks kemiskinan dari Propinsi Bali, Kabupaten Karangasem juga memiliki kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan yang sangat tinggi. Kesenjangan masyarakat yang miskin dan kaya sangat kelihatan dan berbeda jauh, dimana masyarakat pada satu desa ada yang miskin sekali sampai tidak memiliki rumah, pada sisi lain ada masyarakat yang sangat kaya. Keadaan kemiskinan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Karangasem 2013-2014

Wilayah/ Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahannya (P2)		Kemiskinan 2014
	2012	2013	2014	2012	2013	
Karangasem	1,90	0,81	1,21	0,53	0,22	0,30
	1,29	0,82	0,79	0,36	0,28	0,18

Sumber: Bali Dalam Angka 2014, data diolah.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Karangasem menandakan masih tingginya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Karangasem lebih tinggi dibandingkan dengan di Provinsi Bali. Garis kemiskinan Kabupaten Karangasem per kapita per bulan Rp. 205.860 jauh lebih rendah dari garis kemiskinan Provinsi Bali sebesar Rp. 246.598,-

Kawasan Tulamben memiliki penduduk 32.679 orang (6.513 KK) dengan komposisi berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 75% dari penduduk bekerja sebagai petani, sisanya mempunyai profesi sebagai buruh tani, nelayan, wiraswasta, pedagang, dan bidang jasa. Pendapatan masyarakat rata-rata mencapai Rp. 1.640.554 sampai Rp. 2.249.145 per tahun. Di Kawasan Tulamben khususnya di Desa Tulamben dan Purwakerti tidak ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tetapi sebagian besar hidup sebagai nelayan dan pedagang. Penduduk di daerah ini cukup homogen dari segi etnis dan agama. Sebagai pusat pariwisata kawasan ini memiliki

jenis pekerjaan cukup beragam dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, terutama disektor pariwisata.

Berbeda dengan Kawasan Candidasa khususnya Desa Padangbai dan Bugbug yang jumlah penduduknya sebanyak 48.106 orang, dengan tingkat pertumbuhan 1,36 persen dan lebih bersifat homogen ditinjau dari etnis dan agama. Walaupun daerah ini dilalui oleh lalu lintas antarkota dan provinsi pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan terutama pisang dan kelapa, dan sebagian kecil sebagai nelayan. Kedua daerah ini memiliki kondisi geografis relatif sama yaitu daerah landai dari daerah pesisir hingga perbukitan. Kedua kawasan pariwisata ini memiliki karakteristik ekonomi yang mirip, dengan mengembangkan sektor pariwisata laut yaitu *diving* dan *snorkling*. Berikut dijelaskan dua kawasan wisata yang menjadi lokasi penelitian.

Potensi Daya Tarik Wisata di Kawasan Pariwisata Tulamben

Kawasan Pariwisata Tulamben ini merupakan wilayah Kecamatan Kubu dan Abang Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Kawasan Tulamben terletak di daerah pesisir timur Pulau Bali dan berhadapan langsung dengan Gunung Agung dan memiliki 15 lokasi penyelaman yang menarik.

Akibat dari letusan Gunung Agung tahun 1963 yang mengeluarkan 300 juta kubik bebatuan maka pantai di areal ini ditutupi oleh bebatuan. Kondisi ini memberikan keunikan bagi ragam flora fauna yang hidup di perairan Tulamben. Berbagai jenis udang dan kepiting (*macro*) dapat dijumpai hidup di areal Tulamben. Keadaan ini tentunya mengundang perhatian peminat *underwater photography* dari mancanegara. Kawasan Tulamben menjadi area penyelaman terbaik di Bali karena tidak ada arus yang kuat dan lokasi penyelaman tidak terlalu jauh dari pantai. Selain itu, Tulamben memiliki potensi kerangka kapal dagang Amerika Serikat *US Liberty* yang sudah ditumbuhi berbagai jenis karang, anemone, sponge, dan hidup berbagai spesies ikan hias. Jenis ikan yang hidup sebagai ekosistem laut Tulamben adalah *angel napoleon*, *angel payama*, *angel batman*, dan *kape-kape monyong asli*. Kerangka kapal ini berada pada berbagai kedalaman 50 m didasar laut. Suhu air sekitar 26°C-27°C dengan *thermoclines* sampai 24°C. Visibilitas air laut di kawasan ini mencapai 15-30m (50-100ft).

Kawasan Tulamben terdiri dari tiga daya tarik wisata *diving* yang memiliki potensi dan karakter wisatawan yang berbeda. Daerah tersebut adalah daerah Tulamben, Amed, dan Bunutan. Di daerah pantai Tulamben lebih dominan wisatawan dengan kelompok rata-rata 3-8 orang dan menyelam tanpa bantuan perahu, karena lokasi penyelaman hanya 5 meter dari pantai. Wisatawan juga dibawa agen perjalanan wisata dari Sanur dan Tanjung Benoa dengan menggunakan kendaraan minibus dan bus besar.

Tujuan utama wisatawan adalah untuk melihat koral yang tumbuh di bangkai kapal *Liberty*. Rata-rata wisatawan menyelam selama dua kali penyelaman dengan durasi masing-masing di dalam air 40 menit. Wisatawan ini tidak menginap di Tulamben, melainkan kembali ke hotel di Denpasar atau Badung.

Data BPS Kabupaten Karangasem 2014 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun di kawasan Tulamben mencapai 66.179 orang dan di Amed mencapai 2.853 orang. Rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 3-5 hari. Selain di tempat ini wisatawan juga mengunjungi Kawasan Lovina atau kembali ke Denpasar. Wisatawan datang dengan keluarga atau pasangan, sehingga banyak yang melakukan *diving* dan menginap di daerah ini.

Desa Bunutan, merupakan daerah wisata yang baru berkembang dengan fasilitas hotel dan *dive operator*. Wisatawan yang melakukan kunjungan di daerah ini biasanya melakukan penyelaman di daerah Pulau Selang dan Seraya Timur. Daerah ini memiliki arus yang cukup kuat, sehingga wisatawan yang datang dominan wisatawan penyelam profesional dan menginap di hotel terdekat. Terdapat 25 hotel di Desa Bunutan. Selain *diving*, wisatawan juga melakukan aktivitas wisata spiritual dan bulan madu.

Potensi Daya Tarik Wisata di Kawasan Pariwisata Candidasa

Kawasan Pariwisata Candidasa memiliki dua tempat menyelam yang sangat potensial dikunjungi wisatawan, yaitu Teluk Padangbai dan Teluk Amuk. Padangbai terletak hanya kurang lebih 60 km dari Denpasar dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam perjalanan dari Denpasar. Di Padangbai terdapat pelabuhan penyeberangan Bali Lombok yang dilayani kapal ferry. Kawasan Candidasa memiliki 9 lokasi penyelaman yang memiliki berbagai karakteristik. *Dive site* yang baik di Padang Bai yaitu Blue Lagoon, Pura Jepun, Bias Tugal, Ferry Channel, dan Tanjung Sari. Salah satu daya tarik

diving di Padangbai adalah *night dive* menyaksikan *Spanish Dancer* yang kerap dijumpai di area ini. Daerah ini juga terkenal bagi para *photographer (macro photography)*, karena terdapat banyak ragam jenis ikan mulai dari *frog fish, nudibranch*. Teluk Padangbai sangat baik diselami oleh segala level penyelam, dengan visibilitas air rata-rata 12-20m, suhu 22-280C, dan topografi pantai yang landai (Suardana, 2010).

Tipologi Sosial Demografi Responden

Gambaran tentang karakteristik sosial demografi responden seperti umur, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, jumlah anggota rumah tangga, luas lahan tempat tinggal, kepemilikan aset, kepemilikan MCK, dan sumber air bersih seperti dipaparkan berikut. Umur responden berusia 20-60 tahun lebih. Usia terbanyak adalah di atas 60 tahun disusul usia 40-49 tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik Responden

Kategori Responden	Total(%)
Umur	
>60	38 %
40-49	22 %
Pendidikan	
Tamat SD	34%
Tamat SMP	29%
Tamat SMA	24,5%
Pekerjaan Utama	
Nelayan dan Serabutan	30%
Nelayan /Buruh	18%
Tukang Bangunan	12%
Pekerjaan Sampingan	
Pedagang dan Pemandu Selam	52%
Buruh pengangkut alam selat	24%
Sopir	24%
Pendapatan Responden	
≤300.000	18%
≥600.000	82%

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa responden pada kedua kawasan pariwisata masih memiliki berpendidikan sekolah dasar masih tinggi yang diduga sebagai penyebab kemiskinan di kedua Kawasan Pariwisata. Hal ini didukung hasil penelitian Gustafsson, Bjorn and Yue, Ximing (2006), yaitu rumah tangga dengan banyak anggota rumah tangga serta kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah, maka anak-anak tersebut menghadapi resiko kemiskinan yang lebih tinggi dari orang lain.

Hal yang sama disampaikan Affandi (2011), yang menyatakan bahwa rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga lebih dari empat orang dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah memiliki peluang 1,3 kali lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang memiliki pendidikan di atas SMP.

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga miskin (RTM) di Kawasan Tulamben dan Kawasan Candidasa menunjukkan pola yang hampir sama yaitu sebagai petani penyakap, buruh, pedagang, dan kerja serabutan. Pekerjaan sampingan responden adalah sebagai berikut: sebagai buruh pengangkut alat selam, pedagang dan pemandu wisata serta sopir. Dengan adanya pendidikan yang masih rendah menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya dapat menekuni mata pencaharian kasar seperti menjadi buruh pengangkut alat selam.

Dengan berkembangnya kepariwisataan di kedua kawasan ini dapat digambarkan tipologi masyarakat miskin sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tetap dengan mata pencaharian yang lama, seperti nelayan, buruh bangunan, buruh galian, petani penggarap.
2. Masyarakat dengan bekerja sampingan, seperti nelayan dan pemandu wisata lokal.
3. Masyarakat yang beralih mata pencaharian dari nelayan menjadi tukang kebun hotel dan penjual cendera mata

Adapun pendapatan responden pada kedua Kawasan Pariwisata yang kurang dari sampai dengan Rp 300 ribu mencapai 18 persen, sedangkan sisanya sebanyak 82 persen adalah mereka yang memiliki pendapatan antara lebih dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 600 ribu per hari. Dapat dijelaskan pula bahwa pendapatan masyarakat di Kawasan Pariwisata Candidasa lebih

tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di Kawasan Pariwisata Tulamben karena Kawasan Pariwisata Candidasa lebih dulu berkembang dibandingkan Kawasan Tulamben.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Tulamben dan Candidasa

Kecamatan Kubu memiliki jumlah RTM lebih banyak (6.211 RTM) dibandingkan dengan Kawasan Candidasa memiliki jumlah RTM paling sedikit hanya 1521 RTM. Konsentrasi kemiskinan di masing-masing wilayah, untuk Kawasan Tulamben terjadi di Desa Datah, Labasari dan Purwakerthi. Untuk Kawasan Candidasa konsentrasi kemiskinan terjadi di Desa Antiga, Desa Nyuhtebel, dan Padangbai.

Kemiskinan di daerah ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1) Alam, 2) Budaya, dan 3) Rendahnya akses terhadap pembangunan.

1. Faktor alam

Kedua kawasan ini merupakan kawasan pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan gunung. Masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani dan nelayan. Lahan yang tersedia sebagian besar adalah lahan kering dan lautan. Kondisi ini memang sangat ironi karena dikawasan ini berkembang industri pariwisata namun masih menyisakan kemiskinan. Hal ini diperparah adanya masyarakat yang menjual tanah dipinggir laut untuk dijadikan hotel atau tempat usaha. Memang tidak dipungkiri juga daerah Kubu rata-rata adalah aliran lahar pada masa meletusnya Gunung Agung tahun 1963 sehingga daerah ini, tidak memiliki struktur tanah yang baik untuk bercocok tanam. Tanaman yang bisa hidup hanya pohon rontal dan intaran. Sedangkan binatang peliharaan masyarakat adalah kambing dan sapi.

2. Faktor Budaya

Faktor Budaya, di antaranya adanya kebiasaan penduduk melakukan aktivitas yang tidak produktif seperti berjudi ayam (*tajen/* sambung ayam) yang dilaksanakan hampir setiap hari, dari hari Kamis hingga hari Sabtu, mulai siang sampai dengan sore hari. Bahkan pada hari Minggu waktu yang digunakan lebih lama, yaitu dari pagi hari sampai sore hari. Kebiasaan lainnya adalah minum-minum, terutama minum tuak dan arak, terlebih jika ada upacara kematian.

3. Akses terhadap Pembangunan

Rendahnya akses terhadap pembangunan, khususnya pembangunan pariwisata yang sedang berkembang di kawasan ini, disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia rumah tangga miskin pada aspek pendidikan yang hanya berpendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP) ke bawah dan masih banyak penduduk tidak bersekolah. Rata-rata beban tanggungan setiap RTM tiga orang lebih, dan masih banyaknya infrastruktur yang rusak.

Walaupun perkembangan pariwisata di Tulamben dan Candidasa telah memberikan kontribusi pada perubahan mata pencaharian masyarakat yang berdampak terhadap ekonomi, akan tetapi tidak semuanya dapat memberikan dampak secara langsung. Hal ini disebabkan faktor penghambat yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan pandangan Tosun (2000) yang telah membagi hambatan partisipasi masyarakat kedalam tiga bagian hambatan operasional, hambatan struktural dan, hambatan budaya. Dengan demikian, hambatan budaya merupakan salah satu penyebab masih adanya rumah tangga miskin di kedua kawasan pariwisata di Kabupaten Karangasem. Pemberdayaan masyarakat dengan cara berpartisipasi langsung dalam kepariwisataan, seperti bekerja di hotel, menjadi tenaga kerja untuk aktifitas *diving* dan *snorkeling* serta menjual cendera mata kepada wisatawan atau pengelola *diving* dan *snorkeling* dapat mengurangi RTM, seperti dinyatakan Darma Putra dan Pitana (2010: 43).

Perbandingan Dampak Pariwisata terhadap Masyarakat Tulamben dan Candidasa

Pariwisata di kawasan Tulamben dan Candidasa secara tidak langsung memberikan dampak pada perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar. Menurut Goldner and Ritchie (2006: 11) pengembangan pariwisata di suatu daerah akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi masyarakat khususnya mata pencaharian masyarakat yang ditimbulkan dari adanya peluang usaha sektor tersebut dan ikutannya. Dalam hal ini akan dianalisis perubahan struktur mata pencaharian masyarakat dikaji dari sebelum dan sesudah kawasan wisata Tulamben dan Candidasa dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Tabel 3 menunjukkan mata pencaharian penduduk sebelum dan sesudah adanya pengembangan pariwisata di kawasan Tulamben dan Candidasa.

Tabel 3. Mata Pencarian Penduduk Sebelum dan Sesudah Adanya Pengembangan Pariwisata di Kawasan Tulamben dan Candidasa

No	Mata Pencarian Penduduk	Sebelum Pengembangan Pariwisata		Sesudah Pengembangan Pariwisata	
		Tulamben (%)	Candidasa (%)	Tulamben (%)	Candidasa (%)
1	Tidak Bekerja pada Sektor Usaha Pariwisata	93.3	90.0	63.3	50.0
2	Bekerja Pada Sektor Usaha Wisata Tapi Hanya Sampingan	6.7	6.7	30.0	33.3
3	Bekerja Pada Sektor Usaha Wisata Sebagai Pekerjaan Pokok	0.0	3.3	6.7	16.7
	Jumlah	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3 dapat digambarkan adanya perubahan mata pencaharian masyarakat pada kedua kawasan pariwisata, yaitu Tulamben dan Candidasa. Rata-rata dampak perkembangan pariwisata pada kedua kawasan pariwisata mencapai 43 persen, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun sampingan. Perubahan mata pencaharian pada di kedua kawasan ini bervariasi, dikawasan Candidasa perubahan mata pencaharian mencapai 50 persen sedangkan dikawasan Tulamben hanya mencapai 36,7 persen, lebih rendah dari perubahan mata pencaharian dikawasan Tulamebn. Hal ini dapat dipahami, karena kawasan wisata Candidasa berkembang lebih awal sekitar tahun 1980n dibandingkan dengan kawasan Tulamben yang berkembang kemudian sekitar tahun 1990 an, dan dikenal sebagai kawasan untuk menyelam.

Patut mendapat apresiasi, kerana masyarakat telah berpartisipasi pada sektor pariwisata yaitu menjadikan pariwisata sebagai mata pencaharian utama (rata-rata sebesar 12 persen, pada kedua kawasan. Sedangkan masyarakat yang menekuni pariwisata sebagai mata pencaharian sampingan mencapai lebih dari 30 persen. Artinya masyarakat Tulamben dan Candidasa disamping menekuni mata pencaharian sebagai nelayan, dengan adanya perkembangan pariwisata menyebabkan masyarakat memiliki mata pencaharian sampingan, yaitu sebagai nelayan yang melayani wisatawan, berekerja pada beberapa akomodasi dan restoran, serta sebagai penjaga keamanan, tukang kebun dan juga porter yang

membawa peralatan untuk menyelam.

Perkembangan pariwisata di kedua kawasan menyebabkan menurunnya masyarakat yang tidak bekerja pada sektor ini mencapai lebih dari 50 persen dari 90 persen yang tidak bekerja pada sektor pariwisata sebelum adanya perkembangan pariwisata. Dengan demikian secara tidak langsung peran pariwisata telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan yang menyebutkan tentang pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan secara umum dan pengentasan kemiskinan pada khususnya. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Ashley et al, 2000; Ashley, 2006; Darma Putra dan Pitana, 2010).

Simpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Tipologi kemiskinan di Karangasem, yaitu pertama, masyarakat memiliki mata pencaharian sama dengan sebelum pariwisata dikembangkan. Kedua, masyarakat memiliki mata pencaharian sampingan disamping mata pencaharian utama. Ketiga, masyarakat beralih dari mata pencaharian sebelumnya yaitu pariwisata sebagai mata pencaharian utama.

Karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kawasan Tulamben dan Candidasa diduga diakibatkan oleh faktor alam, seperti tanah yang tandus, faktor rendahnya akses terhadap pembangunan, seperti pendidikan yang rendah dan terbatasnya infrastruktur, serta faktor budaya, yaitu sikap mental dan budaya yang dimiliki. Perkembangan pariwisata telah memberikan pengaruh pada perubahan mata pencaharian masyarakat yang mengarah pada tipologi yang heterogen.

Secara umum masyarakat miskin merespons positif perkembangan pariwisata sebagai kegiatan yang memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih ada masyarakat miskin yang belum mengambil peran dalam sektor pariwisata. Hal ini disebabkan adanya hambatan internal dan eksternal dalam berpartisipasi. Hambatan partisipasi masyarakat tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hambatan operasional, hambatan struktural dan, hambatan budaya/*cultural*. Lambatnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam pariwisata karena sikap mental ma-

syarakat yang kurang mau untuk keluar dari lingkaran kemiskinan sehingga motivasi untuk bekerja produktif masih rendah.

Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada tiga hal sebagai berikut. Pertama, asyarakat diharapkan memanfaatkan industri pariwisata yang berkembang di Bali khususnya di Kabupaten Karangasem, sebagai kesempatan untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kompetensi di bidang pariwisata.

Kedua, pemerintah dan pelaku pariwisata diharapkan memberikan bantuan perbaikan prasarana pariwisata untuk mengurangi hambatan aksesibilitas, bantuan keterampilan. Perguruan tinggi juga diharapkan berperan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran peran pariwisata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan bekerja.

Ketiga, penelitian dimasa mendatang perlu dilakukan pada wilayah yang lebih luas sehingga generalisasi hasil penelitian lebih luas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, C dan Roe, D. 2002. Making Tourism Work for the Poor: Strategies and Challenges in Southern Africa. *Development Southern Africa Vol. 19 No.1*. pg 61-82. Carfax Publishing, Taylor and Francis Group.
- Ashley, Caroline. 2002. Methodology for Pro-Poor Tourism Case Studies. *Working Paper*. Overseas Development Institute.
- Ashley, Caroline. 2006. How Can Government Boost the Local Economic Impact of Tourism, option and too. For SNV East and Southern Africa. Overseas Development Institute
- Baskoro. Bra. 2010. *Wisata Kota Jalan Jaksa Sebuah Kajian Sosiologi Pariwisata*. Jakarta: Koekoesan.
- BPS Provinsi Bali. 2010. "Tingkat Kemiskinan Bali, Maret 2010". *Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 29/07/51/Th IV*, 1 Juli 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. 2014. *Karangasem Dalam Angka 2014*.
- Braman, S and Amazonia, F A. 2001. "Practical Strategies for Pro Poor Tourism Tropic Ecological Adventures-Ecuador". Pro Poor Tourism Working Paper No.6, London Overseas Development Institute.

- Darma Putra, I Nyoman dan Pitana I Gede. 2010. *Pariwisata Pro Rakyat: Meretas Jalan Mengetaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Damanik, J., Kusworo, H. A., dan Raharja, D.T. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Jakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM dan Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Goldner, Charles R and Ritchie J.R. Brent. 2006. *Tourism: Principles, Practise, Philosophies. (Tenth edition)*. Canada: John Wiley & Sons.
- Hermantoro, Henry; Isdaryono; Rukendi, Cecep; Baskoro, Bra; Permatasari, Ik K dan Chamdani, Usman. 2010. *Pariwisata Mengikis Kemiskinan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata.
- <http://www.sdgsfund.org/mdgs-sdgs>. Diunduh tanggal 8 Agustus 2016. 18.00 Wita.
- http://www.propoortourism-kenya.org/what_is_propoortourism.html diunduh tanggal 8 Agustus 2016. 18.30 Wita
- <http://bps.go.id/brs/view/1158/>, diunduh Tanggal 8 Januari 2015, 21.00 wita).
- Jamieson W, Goodwin H and Edmunds C. 2004. *Contribution Of Tourism To Poverty Alleviation Pro-Poor Tourism And The Challenge Of Measuring Impacts*. Transport Policy and Tourism Section, Transport and Tourism Division UN ESCAP
- Mograbi, J and Rogerson, C. M. 2007. "Maximising the Lokal Pro-Poor Impacts of Dive Tourism: Sodwana Bay, South Africa". *Urban Forum (2007)* 18:85-104. Published online 26 July 2007. Springer Science + Business Media B.V
- Madiun, I Nyoman. 2010. *Nusa Dua Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern*. Denpasar: Udayana University Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nevin, Tom. 2007. "What is Pro Poor Tourism?" *African Business*; Nov 2007; 336; ABI/INFORM Global pg 50.
- Patera, I Made. 2016. www.pps.unud.ac.id/.../i-made-patera-pariwisata-dan-kemiskinan-di-kab... diunduh Tanggal 9 Oktober 2016 Pukul 19.00 Pm.
- Suardana, Wayan. 2004. "Strategi Pengembangan Pesisir Pantai Tulamben Sebagai Kawasan Wisata Alam di Kabupaten Karangasem". Tesis. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Sudiarta. 2011. Pengembangan konsep pariwisata yang peduli pada kemiskinan (*pro poor tourism*) sebagai strategi dalam mengurangi

- Hlm. 209–227 Dampak Pariwisata terhadap Kemiskinan di Kawasan Pariwisata di Bali
kemiskinan. Laporan penelitian, Universitas Udayana, 2011
- Subagja. 2010. “DPRD Sesalkan Wisata Kemiskinan di Jakarta”. Diakses dari *Detik News*. Minggu 24 Januari 2010. [http//m.detik.com](http://m.detik.com).
- Saptanti, Diah. 2013. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan, *Riptek* Vol.7, No. 2, Hal. 81-96.
- Tosun, Ceva. 2000. “Limits to community participation in the tourism development process in developing countries”, *Tourism Management*, Vol. 21, hlm. 613-633.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPKD) Provinsi Bali Tahun 2010-2014
- Usman, T.S. 2009. “Pemilu 2009: Isu Kemiskinan dan Kesenjangan Serta Pelemahan Kehidupan Berbangsa-Bernegara”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. XVII (1), 2009. pg 1-13. ISSN 0854-526X.
- United Nations World Tourism Organization. 2015. *Global Forecast and Profiles of Market Segments*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata